

BAB 2

SOFT POWER DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

2.1 Politik Luar Negeri

Kebijaksanaan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Politik luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara dimaksudkan kepada tercapainya kesejahteraan rakyat negara tersebut. Indonesia sebagai suatu entitas dalam merumuskan politik luar negerinya berdasar pada perubahan yang terjadi di dunia internasional dan domestik.

Dalam buku yang ditulis Miriam Budiarto, terdapat definisi politik luar negeri sebagai “Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”.¹ Berarti bahwa politik luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya.

Konsep tentang politik luar negeri sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar salah satunya adalah Mappa Nasrun yang memberikan konsep tentang kebijaksanaan luar negeri, yaitu:

“Kebijaksanaan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal”²

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam memberikan batasan tentang kebijaksanaan luar negeri, terlebih dahulu harus mengetahui kondisi internal negaranya sebelum mengeluarkan suatu politik luar negeri. Sebagai bagian dari politik luar negeri, maka politik luar negeri jika ditinjau dari segi proses maka akan erat kaitannya dengan politik dalam negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negara tetapi lebih khusus kepada badan yudikatif

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1995, hal 12.

² Mappa Nasrun, *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problem and Prospect*, Desertasi, Unahs: 1990, hal. 98.

sebagai perumus kebijakan dan badan eksekutif negara selaku pemerintah dan pelaksana kebijakan tersebut yang sewaktu-waktu dapat pula bertindak sebagai pengambil kebijakan jika diberikan kewenangan oleh konstitusi negaranya.

Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Karenanya politik luar negeri dapat juga diartikan sebagai strategi yang atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor hubungan internasional lain.

Dari kedua konsep diatas, dapat ditarik bahwa politik luar negeri adalah sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan internasional dalam bentuk strategi dan rencana yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan suatu negara.

Dalam proses pengambilan politik luar negeri suatu negara tergantung pada sistem politik dalam negeri di negara tersebut. Tetapi secara umum dalam sebuah negara, pelaksanaan politik luar negeri melibatkan semua pejabat dan badan administratif dalam suatu pemerintahan yang langsung ataupun tidak langsung turut menyiapkan pembuatan maupun pelaksanaan dari berbagai keputusan yang berkenaan dengan politik luar negeri.

2.1.1 Politik Luar Negeri Indonesia secara umum

Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam upaya mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat di luar wilayah negaranya, amat penting bagi setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Dalam menjalankan hubungan itu, setiap negara memiliki politik luar negeri, sebagai kumpulan keputusan yang diambil dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional suatu negara. Politik luar negeri erat kaitannya dengan pencapaian tujuan nasional dari suatu negara.³ Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan instrumen yang dimiliki oleh

³ Daniel S. Papp, *op.cit.*, hlm. 43.

pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya⁴.

Tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Aliena pertama yang berbunyi “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri utama dari politik luar negeri Indonesia.⁵

Secara politis, politik luar negeri Indonesia berpedoman pada amanat konstitusi : “*...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”. Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut paham “Bebas - Aktif” yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Prinsip dasar “Bebas – Aktif” itulah yang memberi kandungan atau cerminan kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan melalui mekanisme diplomasi.⁶

Makna dari kata ”bebas” adalah bangsa Indonesia berhak menentukan penilaian dan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah di dunia dan bebas dari keterikatan pada salah satu blok kekuatan dunia. Sedangkan makna dari kata ”aktif” adalah bangsa Indonesia secara aktif dan konstruktif berupaya memberi sumbangan demi tercapainya kemerdekaan yang mutlak di seluruh penjuru dunia, karena sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia pun menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Di antara negara-negara tersebut, Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara berkembang yang tertinggal secara ekonomi di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

⁴ Aleksius Jemadu. 2008. *Op.cit.*, hlm. 61.

⁵ Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa, “Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1966 – 1995 Jilid IVA”, Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005, hlm. 14

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Secara umum sifat, bentuk, intensitas, organisasi dan lingkup diplomasi Indonesia setiap periode tidaklah sama, karena hal itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di level domestik maupun level internasional.⁸

2.2 Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Reformasi

Nyata sekali bahwa yang menjadi acuan dari politik luar negeri Indonesia adalah perilaku atau tindakan Indonesia yang membawa dampak eksternal atau memengaruhi aktor-aktor lain dalam lingkungan eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut, ada konsep-konsep dasar yang terkait dengan politik luar negeri yang perlu dipahami untuk menganalisis politik luar negeri. Salah satu konsep tersebut adalah kepentingan nasional yang menurut Miroslav Nincic⁹ ada beberapa kriteria untuk memenuhinya, yaitu kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional, di mana pencapaian kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, karena kepentingan nasional sangat luas cakupannya, maka diperlukan penjabaran ke dalam tujuan politik luar negeri yang sifatnya lebih spesifik dan dapat diukur tingkat keberhasilan pencapaiannya.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia tentunya sebagai alat pemerintah diharapkan dapat merumuskan tujuan politik luar negeri untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berkuasa atas nama rakyat. Lebih lanjut, tujuan politik luar negeri Indonesia, terutama terhadap negara berkembang yang tertinggal, juga bergantung pada kesempatan dan hambatan yang ada di negara obyek dan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia harus dapat mengidentifikasi kedua hal tersebut demi tercapainya tujuan nasional Indonesia.

Pada tingkat pelaksanaannya, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di antara

⁸ *Ibid*, hlm. vi.

⁹ Aleksius Jemadu. 2008, *op.cit.*, hlm. 67.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69

seluruh *stake holders* yang berwujud pada sebuah konsep diplomasi total.¹¹ Oleh karenanya, interaksi yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara lainnya harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Dalam hal ini, tentunya masyarakat dunia harus dapat menerima realitas kemajemukan dan kompleksitas Indonesia sebagai fakta yang khas.

Departemen Luar Negeri Indonesia merumuskan bahwa paling tidak sedikitnya ada tiga arahan politik luar negeri Indonesia yang sangat penting untuk dijalankan saat ini, yaitu:¹²

- Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.
- Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi regional.
- Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pematapan perdamaian dunia.

Oleh karena itu, dalam konsteks yang lebih luas Indonesia juga meletakkan tiga program utama nasional politik luar negeri yang harus segera dilakukan yaitu:¹³

- Pematapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.
- Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional.
- Penegasan komitmen Perdamaian Dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan

¹¹ www.deplu.go.id. *Landasan, Visi dan Misi Politik Luar Negeri*.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

internasional. Langkah diplomatik dan multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional.

Selain itu, dengan mempertimbangkan kurun waktu hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara lainnya terutama Asia dan Afrika, maka tentunya hubungan tersebut mengalami pasang dan surut. Tentunya hal itu tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang turut dipengaruhi oleh perkembangan politik di dalam negeri, terutama berkaitan dengan prioritas pemerintahan yang berkuasa.

Politik luar negeri Indonesia pada sebelumnya dilandasi oleh realisme dan pragmatisme hubungan internasional. Kepentingan nasional tertinggi pada masa itu ialah pembangunan nasional yang dititik-beratkan pada bidang ekonomi guna memperoleh ketahanan nasional yang optimal. Pragmatisme ini tentunya berakibat pada inkonsistensi dalam politik luar negeri Indonesia terhadap negara-negara Timur Tengah dan Afrika: terkadang mengeksploitasi predikatnya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, terkadang malah berseberangan (atau setidaknya tidak sejalan) dengan negara-negara Timur Tengah.

Melalui Sidang Umum MPR tahun 1978 dicapai konsensus nasional mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada sidang tersebutlah tercapai suatu konsensus tentang Pancasila sebagai asas tunggal negara. Adanya konsensus asas tunggal tersebut berpengaruh pada penentuan politik luar negeri, yaitu bahwa Indonesia tidak ingin tergabung dalam negara komunis maupun negara Islam, meski mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Hal ini tercermin, misalnya, dalam kebijakan Indonesia terhadap Palestina. *”Sedangkan adanya dukungan atas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada dasarnya lebih didasarkan pada prinsip kemerdekaan nasional daripada prinsip keagamaan”*¹⁴

¹⁴Ganewati Wuryandari. “Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik”, P2P-LIPI, 2008, hlm.127.

Runtuhnya rezim Orde Baru yang dijalankan oleh Soeharto selama kurang lebih 30 tahun menyisakan segunung pekerjaan rumah untuk Republik Indonesia. Mulai dari isu penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, hingga kehidupan berdemokrasi rakyat Indonesia yang selama ini 'diberangus'. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto harus merelakan kursi kepresidenannya setelah didesak oleh gelombang unjuk rasa besar-besaran yang terdiri atas beberapa elemen masyarakat seperti mahasiswa, kaum reformis Indonesia, kaum intelektual, dan lain-lain. Wakil Presiden RI saat itu, B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI, dan sukses mengantarkan Indonesia pada Pemilu 1999 yang lebih demokratis, jujur, adil, dan langsung. Gerakan reformasi ini tampaknya menjadi euforia baru bagi masyarakat Indonesia.

2.2.1 Politik Luar Negeri Indonesia Era Habibie

Runtuhnya Orde Baru memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperbaiki komitmen yang salah terkait pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Presiden Habibie tetap mempertahankan dan mengandalkan dukungan negara-negara barat, terutama AS, dan dukungan finansial dari IMF ketimbang lebih berfokus dalam mengembangkan kedekatan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah.¹⁵ Indonesia pada saat itu menghadapi terjangan krisis finansial, transisi politik, dan memulihkan keamanan publik sehingga isu-isu domestik masih menjadi prioritas kebijakan rezim Habibie. Nuansa Islam dalam perumusan politik luar negeri Habibie hanya sebatas pada kepentingan untuk mempertahankan legitimasi rezimnya dan kepentingan-kepentingan politisnya.

Dilema politik luar negeri Indonesia pada era Habibie adalah bagaimana mengakomodasikan aspirasi Islam sebagai 1 kesatuan dan peran IMF serta kekuatan eksternal lainnya seperti AS dalam keberlangsungan Indonesia. Pada akhirnya politik luar negeri Indonesia era Habibie tetap melanjutkan politik luar negeri era Suharto.¹⁶

Indonesia merupakan negara di mana nasionalisme menjadi elemen penting dalam politik domestik. Oleh karena itu ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak asing akan mengundang respon publik yg besar. Contohnya makin maraknya

¹⁵ Rizal Sukma, "Islam in Indonesia Foreign Policy", Taylor & Francis e-Library, 2004, hlm. 85.

¹⁶ *Ibid.*

demonstrasi anti-AS & IMF dengan tuduhan AS mengintervensi politik domestik Indonesia dengan menunda rencana *bailout* ekonomi untuk Ind sebesar US\$ 43 milyar setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan kejatuhan Soeharto, Pemerintah Indonesia juga dituduh telah jatuh pada skenario “perangkap global imperialism” dan telah menjual sebagian kedaulatannya dengan menerima bantuan IMF yang diikuti beberapa persyaratan tertentu.¹⁷

Wacana untuk mencari bantuan finansial terhadap Indonesia yang sedang krisis banyak bermunculan seperti menolak menunggu bantuan IMF, melainkan mencari bantuan dari negara-negara Arab yg kaya minyak. Meskipun banyak juga usulan yang mengakui peran IMF dalam membantu keuangan Indonesia. Karena meskipun IMF dianggap memiliki motif tersendiri dalam membantu Indonesia karena pada saat Indonesia benar-benar membutuhkan IMF selalu menunda dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Akan tetapi, jika IMF tidak memberikan kepercayaan kepada Indonesia maka institusi-institusi keuangan lainnya akan berat untuk membantu Indonesia pula. Pada pertengahan Juli 1998, IMF mengucurkan dana bantuan sebesar US\$ 1 milyar dan dengan jumlah yang sama pada bulan Agustus 1998.¹⁸

Rezim Habibie juga tidak mengakomodasi suara Islam ke dalam politik luar negerinya, melainkan seperti yang terlihat di atas, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara barat, terutama AS. Kebijakan Indonesia di negara-negara Islam juga tidak ada perkembangan sebab selama era Habibie hampir tidak ada referensi D-8 (kelompok 8 negara Islam) dalam retorika diplomasi Indonesia. Selain itu tidak ada pula aktivitas Indonesia yang signifikan dalam forum OIC (Organization of Islamic Countries).¹⁹

Hal tersebut dapat dipahami sebab Habibie juga cenderung menghindari faktor solidaritas agama dalam politik internasional, contohnya pada bulan September 1998 AS memborbardir Afganistan dan Sudan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Habibie

¹⁷ *Ibid.* hlm. 86

¹⁸ *Ibid.* hlm. 88

¹⁹ *Ibid.* hlm. 90.

mengatakan bahwa dirinya memahami alasan pengeboman AS, sementara Menteri Luar Negeri Ali Alatas hanya “menyesali” aksi pengeboman.²⁰

Terkait dengan masalah Timor-Timur, Presiden Habibie mendapatkan rapor yang buruk dalam penanganan politik luar negerinya. Dilihat dari sudut pandang strategis, pemerintahan Habibie dianjurkan untuk melanjutkan dialog dengan kelompok-kelompok berbeda yang merepresentasikan kepentingan berbeda pula diantara rakyat Timor-Timur. Namun, Habibie sangat tergantung pada dukungan militer dalam mempertahankan kekuasaannya dan tidak dapat memberikan kesan bahwa dirinya menjaga jarak dengan militer terkait permasalahan Timor - Timur. Berdasarkan perhitungan politik jangka-pendek, Habibie akan tetap tidak antusias untuk melanjutkan pendekatan konsolidatif pada kelompok anti-integrasi. Hal ini menjelaskan mengapa tidak ada perkembangan dalam pembicaraan mengenai Timor-Timur.²¹

Pemerintahan Habibie memberi pelajaran penting bahwa politik luar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukkan hal ini dengan jelas. Mekanisme perubahan paling penting di Timor-Timur pada 1999 adalah perubahan kebijakan yang diumumkan setelah rapat kabinet akhir Januari. Pada 27 Januari Pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia bersiap untuk membantu kemerdekaan di Timor - Timur apabila rakyat Timor - Timur menolak tawaran rencana otonomi/status spesial oleh Indonesia. Namun, tindakan ini tidak akan dilaksanakan sampai MPR merapatkannya setelah Pemilu 7 Juni. Pemerintah pada saat yang sama menawarkan perpindahan pemimpin pro-kemerdekaan Xanana Gusmao dari LP Cipinang (Jakarta) ke kompleks Pemerintahan di Jakarta. Perkembangan ini didukung oleh Kepala TNI dan Menteri Pertahanan Jendral Wiranto, yang mengatakan pada 28 Januari bahwa TNI menghargai keputusan untuk mengizinkan Timor - Timur memisahkan diri melalui cara terhormat.

²⁰ *Ibid.* hlm. 91

²¹ Muhammad A.S. Hikam, “*Communication Democracy in Indonesia and East Timor*”, In *Pacifica Review*, Volume 12, Number 1, February 2001, hlm. 83-84.

Pengumuman perubahan kebijakan ini sangat kompleks karena proses perubahan politik yang berlangsung di Indonesia dan keterbatasan kekuasaan politik yang dimiliki oleh Presiden Habibie. Ketika Pengumuman tanggal 27 Januari dilakukan yang menunjukkan pandangan Presiden Habibie dan Penasihatnya, Kabinet dari Pemerintahan Habibie tampak tidak solid terhadap perubahan kebijakan ini. Menlu RI Ali Alatas dilaporkan menolak membantu kemerdekaan Timor - Timur.²²

2.2.2 Politik Luar Negeri Indonesia Era Gus Dur

Pada tahun 1999 Indonesia berhasil mengadakan pemilihan umum yang mengantarkan Abdurrahman Wahid atau yang lebih populer dipanggil Gus Dur menjadi Presiden RI yang ke 4. Saat itu, Gus Dur merupakan figur yang dikonstruksikan dan dikenal publik sebagai tokoh 'tengah' yang lebih baik dibandingkan dengan tokoh-tokoh reformis Indonesia lainnya. Tujuannya jelas, Indonesia harus dapat memperbaiki kesalahan sistem berpolitik dan bernegara yang selama ini dicengkeram rezim otoritarian Orde Baru, sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional tentang wajah baru Indonesia yang lebih demokratis. Tanggung jawab besar ada di pundak pemerintahan Gus Dur.

Analisis diplomasi luar negeri tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fenomena politik dalam negeri.²³ Dalam konteks ini, semakin kuat legitimasi dalam negeri suatu rezim politik maka semakin cair (*liquid*) pula pencapaian dan akseptabilitas internasional suatu negara. RI yang kala itu dipimpin Gus Dur menghadapi tantangan untuk merevitalisasi demokrasi demi mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional.

Satu terobosan orisinil yang dilakukan Gus Dur ialah dia mengonsolidasi legitimasi politik domestiknya dari jauh (*remote consolidation*). Hal ini dilakukannya secara spesifik dengan lontaran polemik kontroversial atas isu domestik, contohnya seperti isu tiga menteri yang terlibat KKN saat Gus Dur sedang berkunjung ke AS.²⁴ Saat itu, Gus Dur tampak sedang mengukur dukungan internasional terhadap pemerintahannya. Hasilnya pun cukup baik, masyarakat internasional sejauh itu

²² *Ibid.*

²³ John Kurt Jacobsen, "All Politics are Domestic", (Ph.D. Program in Political Science of the City University of New York, Oktober 1996), Vol. 29, No. 1, hlm. 93-115.

²⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0004/28/nasional/mesk28.htm>

mendukung secara politik pemerintahan Gus Dur yang mengukir wajah Indonesia baru. Figur Gus Dur merupakan figur yang paling pantas membawa misi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan rumusan politik luar negeri Indonesia melalui penyerapan aspirasi dan ekspektasi internasional.

Beberapa pola kebijakan/politik luar negeri pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, antara lain: Perumusan politik luar negeri berpola “arus-balik” Biasanya, para presiden RI terdahulu menetapkan dulu basis politik luar negerinya, baru melakukan diplomasi ke luar (contoh Soekarno yang mengibarkan bendera antinekolim yang konfrontatif, dan Soeharto yang menancapkan strategi regionalisme ASEAN dan integrasi Timtim); Adapun pola Presiden Gus Dur justru sebaliknya. Dia menjaring dulu opini dunia atas konsep kebijakan melalui diplomasi. Setelah itu, baru dirumuskan *platform* politik luar negerinya. Legitimasi, kapabilitas, dan talenta personal berdiplomasi menyokong pola baru ini. Contohnya Dalam periode pemerintahannya (22 bulan), Gus Dur sudah berkunjung ke tak kurang dari 29 negara, dan bertemu banyak pemimpin dan tokoh dunia, mulai dari Bill Clinton, Jiang Zemin, Fidel Castro, Paus Yohannes Paulus II, Nelson Mandela, hingga Corazon Aquino, dan lain-lain.

Selain itu Gus Dur menyadari rendahnya daya tawar diplomasi RI saat itu sehingga lebih mengedepankan diplomasi bilateral ketimbang multilateral.²⁵ Namun pada beberapa kesempatan, Gus Dur menekankan tentang pentingnya kemandirian bangsa Indonesia, terutama terhadap rezim-rezim internasional yang ingin mengintervensi kebijakan dan arah politik Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika dia sempat menggagas Poros Jakarta-Beijing-India.²⁶ Akan tetapi, pada kesempatan lain dia malah berujar, “*Kalau kita tidak dapat bantuan (IMF), kita macet sebagai bangsa!*”²⁷

²⁵ Contohnya dalam isu hutang luar negeri; rezim Gus Dur cenderung menggunakan forum bilateral untuk negosiasi hutang luar negeri ketimbang menggunakan forum multilateral, seperti *Consultative Group on Indonesia (CGI)* yang selalu dimanfaatkan rezim orba.

²⁶ Gus Dur ingin melakukan penegasan posisi bahwa Indonesia memiliki alternatif selain dunia barat dan/atau ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Akan tetapi, manuver orisinil itu terkubur begitu saja tanpa ada implemetasi apa pun setelah Gus Dur memenuhi undangan Presiden AS Bill Clinton via telepon; isu poros alternatif itu bahkan tetap terkubur hingga pemerintahan RI saat ini.

²⁷ *Kompas*, 4 Maret 2000, hlm. 6. Komentar ini dilontarkan Gus Dur saat ditanyai mengenai keputusan pemerintahannya menaikkan harga BBM.

Beberapa manuver pemerintahan Gus Dur yang sangat kontroversial adalah ketika Gus Dur ingin membuka hubungan dagang langsung dengan Israel.²⁸ Atau ketika dia ingin mencabut Tap MPRS No.25/MPRS/1966 tentang pelarangan ajaran komunis dan Marxisme.²⁹ Ini semua kemudian memicu protes dan penentangan besar-besaran dari khalayak luas. Terlepas dari pro-kontra yang ada, dapat disimpulkan bahwa Gus Dur sebagai *decision-maker* berpikir terlalu maju dan gamblang pada masanya, sementara rakyat kita belum siap untuk perubahan sedemikian fundamental.³⁰

2.2.3 Politik Luar Negeri Indonesia Era Megawati

Indonesia di bawah pemerintahan Megawati terus menunjukkan kelemahan dari sisi domestik. Pemerintahan koalisi ini menunjukkan kerapuhan dari politik-nya Indonesia dengan terlihatnya kompetisi ideologi, terutama diantara nasionalisme yang sekuler dan Islam di dalam sistem politik yang nuansa otoritarianismenya masih tinggi.

Pemerintahan Megawati juga menunjukkan betapa sulitnya memperbaiki ekonomi di dalam situasi politik saat itu. Walaupun ada kestabilan politik di level elit, namun perbaikan keadaan politik jauh dari sempurna. Semua masalah dari pemerintahan Abdurahman Wahid sebelumnya tetap mempersulit pemerintahan Megawati. Perlu dilihat bahwa pada masa jatuhnya Wahid dan bangkitnya Megawati, jelas-jelas menunjukkan betapa kompleks dan ruwetnya keadaan politik Indonesia pada era setelah Soeharto. Setelah jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, kekuatan anti-orde baru – yang direpresentasikan oleh Wahid, Megawati dan Amien Rais – justru mereka menemukan diri mereka pada posisi yang sulit untuk membentuk sebuah gabungan kekuatan untuk menjalankan reformasi dan demokrasi.

Pada masa Megawati, ada enam program kerja, yaitu: (1) Mempertahankan kesatuan bangsa; (2) Melanjutkan reformasi dan proses demokrasi; (3) Menormalisasikan kehidupan ekonomi; (4) Menjunjung tinggi hukum, menjaga keamanan dan perdamaian, menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme;

²⁸ Rizal Sukma, *op.cit.*, hlm. 103.

²⁹ *Kompas*, 28 April 2000.

³⁰ RRC contohnya, dengan logika dan konteks yang sama, pada 3 November 2008 membuka hubungan dagang langsung dengan Taiwan setelah 60 tahun lebih berseteru. *Rational-choice* yang dapat ditarik mungkin adalah imbas krisis finansial global 2008 (momentumnya tepat). Dalam pendiriannya, RI mengakui Palestina secara *de jure* dan *de facto*, dan mengutuk Israel sebagai agresor. RI juga memiliki sejarah yang kelam terhadap gerakan komunisme di Indonesia.

(5) Mengembalikan kredibilitas internasional Indonesia; dan (6) Bersiap untuk Pemilu 2004. Walaupun “Enam program kerja” ini tidak menunjukkan arah politik, tetapi prioritas dari pemerintahan Megawati sudah terlihat, dalam hal ini politik luar negeri pun akan diarahkan sesuai dengan “enam program kerja” tersebut dan juga agar bisa men-support “enam program kerja” tersebut.³¹

Politik ‘Bebas Aktif’ dianut oleh pemerintahan Megawati, baginya lebih baik menggunakan tema tradisional yang sudah pernah ada, daripada mencari sebuah gaya baru dalam politik luar negerinya.³² Dengan kata lain politik luar negeri Megawati menunjukkan sebuah lanjutan dari orde baru, pertama, penekanan pada politik bebas aktif, yang menunjukkan maksud untuk mengembalikan politik luar negeri Indonesia ke fungsi tradisionalnya dalam memenuhi politik dalam negeri dan keadaan ekonomi. Kedua politik luar negeri Megawati digunakan sebagai alat untuk membentuk lingkungan/hubungan internasional yang damai yang akan memfasilitasi/mem - *backup* keadaan dalam negeri.³³ Ketiga, pemerintahan Megawati juga menandai kembalinya konsep politik luar negeri yang menganggap Asia Tenggara sebagai bagian penting bagi Indonesia dan juga bagi Asia Timur, Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik selatan lainnya.³⁴

Menanggapi serangan teroris di AS pada tanggal 11 September 2001, Presiden Megawati berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Bush pada tanggal 19 September, seminggu setelah peristiwa tersebut. Walaupun pada saat itu terjadi protes besar-besaran di Jakarta oleh banyaknya organisasi Islam dikarenakan tidak terimanya mereka atas tuduhan Amerika Serikat bahwa Osama bin Laden yang bertanggung jawab atas kejadian 11 September, bahkan hal ini juga oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, dianggap sebagai tindakan Amerika Serikat untuk mendiskreditkan agama Islam.³⁵

Pada kesempatan tersebut, Megawati menyatakan turut berduka cita atas korban yang ditimbulkan oleh serangan teroris 11 September 2001 dan sangat mengecam

³¹ Rizal Sukma, *op.cit.*, hlm. 129

³² *Ibid*, hlm. 128.

³³ *Ibid*, hlm. 129.

³⁴ *Ibid*, hlm. 130.

³⁵ *Ibid*, hlm. 132.

segala macam bentuk dan wujud terorisme. Sebagai timbal baliknya, Washington berjanji untuk membantu Indonesia dalam membangun kembali perekonomiannya yang runtuh akibat krisis moneter Asia.³⁶

2.3 *Soft Power*

2.3.1 Konsep *Power*

Sebelum memasuki teori *Soft Power*, maka pada awalnya perlu diperkenalkan konsep *Power* itu sendiri. *Power* menurut Joseph Nye adalah,

*“The dictionary tells us that Power is the capacity to do things. At most general level, Power means the ability to get the outcomes one wants. The dictionary also tells us that Power means having the capabilities to affect the behavior of others to make those things happen. So more specifically, Power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants.”*³⁷

Melihat definisi di atas maka dapat diterjemahkan adalah “*Power*” merupakan kemampuan suatu entitas untuk mengendalikan entitas lainnya sesuai dengan keinginan yang dimaksud.

Menurutnya, Nye terdapat tiga cara utama untuk mendapatkannya: *pertama*, memaksa atau mengancam; *kedua*, memberi insentif; dan *ketiga*, mengkooptasi atau memikat. Kedua cara pertama disebut Nye sebagai *Hard Power*. Yang terakhir disebutnya sebagai *Soft Power*.

Bagi kaum realis dalam hubungan internasional seperti Hans Morgenthau, Nicollo Machiavelli dan Stephen Waltz, *Power* sifatnya absolut, dimiliki oleh negara dan tidak dapat dihilangkan namun dapat berpindah tangan. Menurut Morgenthau *Power* adalah “*as anything that allows one state to establish and maintain control over another.*”³⁸ Lebih lanjut, “*Power, of course may be augmented in a variety of ways, such as by improving economic strength, by using ideological suasion, or by*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Joseph Nye, 2004, *op.cit.*, hlm. 1.

³⁸ Daniel S. Papp, *op.cit.*, hlm. 44.

enhancing military capabilities.”³⁹ Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa sejarah di masa lalu, penggunaan *Power*, dekat kaitannya dengan “*Hard Power*”, karena banyak peristiwa di masa lalu menuliskan sejarah mengenai peperangan, seperti perang dunia pertama dan kedua, penggunaan kekuatan militer untuk menganeksasi suatu wilayah atau penggunaan kekuatan militer untuk memberikan pengaruh yang absolut terhadap daerah tertentu. Selain itu *hard Power* lebih mudah diukur kapasitasnya dari suatu negara yaitu dengan mengukur GDP, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi dari suatu negara tertentu. Setidaknya hal tersebut masih berlaku sampai perang dingin usai.

2.3.2 *Soft Power dan Soft Diplomacy*

Nye memodifikasi definisinya tentang *Power* untuk gagasan *Soft Power*-nya, yaitu sebagai kemampuan dalam “*getting others to want the outcome that you want.*”⁴⁰ Dengan kata lain, melalui *Soft Power*, suatu negara dapat mendapatkan sesuatu yang diinginkannya terjadi di percaturan politik dunia karena negara lain memang ingin melakukannya. Tidak ada unsur paksaan disini; yang ada adalah unsur ketertarikan atau keterpikatan.

Setidaknya terdapat tiga sumber *Soft Power*: budaya, nilai dan kebijakan.⁴¹ Kedua sumber pertama merupakan *Soft Power* yang menjadi tujuan dari *soft diplomacy*. Melalui diplomasi ini, negara berusaha sedapat mungkin untuk memikat negara lain sekaligus masyarakat yang ada di dalamnya dengan kebudayaan yang dimiliki dan nilai-nilai yang dianutnya.

Tiga tipe kekuatan oleh Joseph Nye

| | Behaviors | Primary Currencies | Government Policies |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Military Power | Coercion Deterrence Protection | Threats Force | Coercive Diplomacy War Alliance |
| Economic Power | Inducement Coercion | Payments Sanctions | Aid Bribes Sanctions |

³⁹ *Ibid.* hlm 44-45

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 5.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 11

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|--|
| <i>Soft Power</i> | Attraction Agenda Setting | Values Culture Policies Institutions | Public Diplomacy Bilateral and multilateral diplomacy |
|--------------------------|------------------------------|---|--|

Sumber: Joseph Nye, "*Soft Power: The Means to Success in World Politics*"
Tabel 2.1.

Namun pada perkembangan hubungan internasional kontemporer, semakin memandang perang sebagai suatu upaya diplomasi melalui intimidasi/kekerasan, perang dinilai terlalu mahal dan beresiko tinggi. Masuknya pemikiran-pemikiran liberal ke dalam studi dan praktik hubungan internasional menjadi lahan subur bagi munculnya suatu bentuk diplomasi yang berbeda. Diplomasi tersebut dijalankan tidak dengan menggunakan instrumen perang. Diplomasi bentuk baru ini memiliki karakter, yang dari kacamata pendukung perang, lebih halus, sehingga sering disebut sebagai *soft diplomacy*.⁴²

Diplomasi itu sendiri, menurut K. M. Pannikar merupakan suatu seni menyampaikan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Di Perancis, Cardinal Richelieu memandang diplomasi sebagai suatu proses yang menjaga kesinambungan (hubungan), dan oleh karenanya pembentukan opini publik menjadi penting. Dari kedua definisi ini, nampak dua dimensi dari diplomasi: penyampaian pesan dan kesinambungan hubungan.

Penyampaian pesan di sini lebih dari pada sekedar formalitas komunikasi, yang biasanya terjebak pada komunikasi satu arah. Lebih dari itu, pesan yang disampaikan tersebut haruslah merupakan pesan sebagaimana dimaksudkan oleh negara yang menyampaikannya. Agar pesan yang sampai tidak bias, maka diperlukan suatu pengertian bersama (*mutual understanding*). Pengertian bersama yang bisa terpelihara, menjadi kondisi utama bagi terciptanya dimensi kedua dari diplomasi sebagaimana disampaikan sebelumnya, yaitu kesinambungan hubungan.

Mutual understanding tidak bisa dicapai dengan perang dan intimidasi yang condong pada pemaksaan pengertian sepihak. Dibutuhkan cara lain; cara yang lebih

⁴² Jack Kemp, (2007). "*Soft Diplomacy is the Best Plan*," www.humanevents.com.

“lunak” – *soft diplomacy*. Salah satu instrumen yang digunakan oleh diplomasi ini adalah komunikasi, sebagaimana disampaikan kedua pakar diplomasi berikut: *“Diplomacy does not depend on particular distributions of Power among particular entities at particular times. It depends only on the prior existence of human societies with their own needs for security and therefore communication.”*⁴³ Di dalam komunikasi tersebut yang terjadi adalah pertukaran pesan, dan bukannya suatu penyampaian pesan sepihak. Proses pertukaran inilah yang krusial bagi pembentukan pengertian bersama.

Pengertian bersama ini, dalam konteks *soft diplomacy*, merupakan suatu pengertian, persepsi, atau pra-anggapan tentang suatu citra suatu negara. Komunikasi merupakan sarana penting demi mencapai suatu pengertian bersama. Suatu pengertian bersama biasanya terhalang oleh perbedaan budaya. Pengertian budaya di sini, sebagaimana Clifford Geertz, merupakan tradisi pemaknaan yang ada dalam suatu kelompok sosial – dalam hal ini negara. Perbedaan budaya tadi perlu untuk dijumpatani. Di sinilah komunikasi sebagai *soft diplomacy* mengambil perannya.

Berbeda dari diplomasi tradisional, *soft diplomacy* mengambil *setting* di masa di mana monopoli negara sebagai aktor utama diplomasi mulai bergeser dan memberikan ruang untuk aktor-aktor baru. Aktor-aktor tersebut, berbeda dari para diplomat karir yang menjalankan diplomasi tradisional, cenderung tidak terlatih secara khusus, dan kadang kala kurang memahami perannya sebagai seorang ”diplomat.”⁴⁴ Sebagai contoh, mahasiswa yang belajar di luar negeri merupakan “diplomat,” diakui atau tidak, yang turut menyampaikan “informasi” mengenai negeri asalnya, disadari atau tidak. Pengakuan dari seorang mahasiswa Indonesia di Malaysia memperjelas gagasan ini, *“Sekaranglah saatnya era people to people diplomacy, dimana kita semua dituntut untuk menampilkan citra positif bangsa semaksimal mungkin. ... menjadi jembatan untuk mempererat komunikasi dan menumbuhkan kebersamaan dan saling pengertian antar bangsa...”*⁴⁵

⁴³ Hamilton, K. dan Langhorne, R. *The Practice of Diplomacy*. London: Routledge, 1995, hlm. 3.

⁴⁴ Langhorne, 2008, hlm. 55.

⁴⁵ *DetikNews*, “*Soft Diplomacy Lewat Budaya*,” 29/072007. www.detiknews.com/read/2008/07/soft-diplomacy-lewat-budaya

Soft diplomacy sering kali disebut juga sebagai diplomasi kultural, juga diplomasi publik. Perbedaan sebutan ini tidak malah mengaburkan gagasan *soft diplomacy* sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Acuan sentral ketiga sebutan tadi sebenarnya sama, yaitu suatu “*transnational flow of information and ideas*” yang mana “*image creation and management is a key resource*”.⁴⁶

2.3.3 *Soft Diplomacy* dalam Politik luar negeri Indonesia

Melalui *soft diplomacy*, banyak hal yang dapat dilakukan suatu negara. Ia bisa melakukannya dengan diplomasi multilateral maupun bilateral, bisa juga dengan mengeksport produk-produk budaya, atau dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung perdamaian dunia. Namun demikian, untuk dapat mengukur apakah *Soft Power* telah didapat melaluinya, bukanlah hal yang mudah. Nancy Snow menawarkan tiga dimensi untuk mengukurnya.⁴⁷

- Saat budaya dan nilai yang ditunjukkan sudah sesuai dengan norma-norma global, sehingga diterima oleh masyarakat dunia.
- Saat suatu negara mendapatkan akses melimpah ke saluran-saluran komunikasi sehingga dapat mempengaruhi pandangan dunia tentang suatu isu.
- Saat kredibilitas suatu negara meningkat di mata internasional.

Secara implisit, Snow ingin menekankan bahwa **citra**, **reputasi**, dan **kredibilitas** merupakan *currency* dari *Soft Power* yang didapat dari *soft diplomacy*.

Menurut Andri Hadi, Direktur Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berbeda dengan *nation branding* yang akhirnya berpengaruh pada perilaku audiens, yaitu membeli atau mengunjungi, *soft diplomacy* lebih menekankan pada pembentukan dan pemeliharaan citra positif suatu negara.⁴⁸ Gilles Scott-Smith menambahkan, untuk mendapat citra yang baik, suatu negara harus mampu mengkonstruksinya. Apabila citranya terlanjur buruk, maka negara harus me-rekonstruksinya, atau dalam kalimat Scott-Smith sendiri, “*dislodging*

⁴⁶ Hocking, B., “*Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy*,” dalam J. Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. Hlm. 41

⁴⁷ Snow, N. “*Rethinking Public Diplomacy*,” dalam N. Snow dan P. M. Taylor, *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. New York & London: Routledge.Snow, 2009, hlm. 4

⁴⁸ Andri Hadi, “Diplomasi Publik dalam Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia”, disampaikan pada Kuliah Umum Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah (Jakarta, 5 September 2008).

previously fixed notion of identity..”⁴⁹ Berkaitan dengan penggeseran identitas, konstruktivis hubungan internasional Alexander Wendt mengusulkan dua kondisi agar hal tersebut dapat mulus terjadi.⁵⁰

- Harus ada *alasan* untuk mempersepsi negara tersebut dengan cara yang sama sekali berbeda.
- Harus ada ganjaran (*pay-off*) bagi mereka yang mengubah persepsinya tentang negara tersebut.

Berkaitan dengan reputasi, György Szondi menempatkan reputasi positif diatas citra positif. Menurutnya, perbedaan di antara keduanya adalah bahwa citra merupakan sesuatu yang dapat dikonstruksi, sementara reputasi merupakan sesuatu yang diperoleh (*earned*).⁵¹ *Soft diplomacy*, bagi Szondi, seluruhnya merupakan ‘manajemen reputasi nasional’. Sasaran dari *soft diplomacy*, berkaitan dengan reputasi, tidak hanya perubahan perilaku (*behavior*) – membuat seseorang melakukan sesuatu, namun juga mencakup perubahan sikap (*attitude*), seperti mendukung – atau setidaknya tidak menentang – politik luar negeri suatu negara.⁵² Jadi, dapat disimpulkan bahwa *soft diplomacy* merupakan perkara memenangkan hati dan pikiran orang lain, baik melalui cara formal maupun tidak.⁵³

Untuk memiliki reputasi dan citra yang baik, maka suatu negara penting untuk memiliki kredibilitas. Daniel O’Keefe mendefinisikan kredibilitas sebagai suatu “*judgments made by a perceiver (e.g. message recipient) concerning the believability of a communicator.*”⁵⁴ Dari definisi ini tampak bahwa kredibilitas merupakan sesuatu yang berbasiskan pada penerima (*receiver-based*), oleh karena itu siapapun yang ingin memproyeksikan kredibilitas melalui *soft diplomacy* harus mengadopsi pendekatan *audience-centred*.⁵⁵ Untuk mendapatkan kredibilitas, Robert Gaas dan John Seiter

⁴⁹ Scott-Smith, Giles, “*Exchange Programs and Public Diplomacy*,” dalam Nancy Snow dan Philip Taylor (ed.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, (New York: Routledge, 2009, hlm 54)

⁵⁰ Alexander Wendt, “*Anarchy is what states make of it.*” *International Organization*, 1992, hlm. 398.

⁵¹ György Szondi, “*Central and Eastern European Public Diplomacy: A Transitional Perspective on National Reputation Management*” dalam Nancy Snow dan Philip Taylor (ed.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, (New York: Routledge), 2009, hlm. 298.

⁵² *Ibid.*, hlm. 299.

⁵³ Wang, J. “*Telling the American story to the world: The purpose of U.S. public diplomacy in historical perspective,*” *Public Relations Review*, Vol. 33, 2007, hlm. 21

⁵⁴ Daniel J. O’Keefe, “*Persuasion: Theory and Research*”, Newbury Park, CA: SAGE, 1990, hlm. 130-1

⁵⁵ Robert H. Gass dan Seiter, John S., “*Credibility and Public Diplomacy*” dalam Nancy Snow dan Philip Taylor (ed.), *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, New York: Routledge, 2009, hlm. 162.

mengusulkan tiga dimensi yang harus dimiliki suatu negara: ekspertis atau kompetensi, kepercayaan (*trustworthyness*), dan ketulusan atau niat baik (*good will*).⁵⁶

Politik luar negeri Indonesia paska reformasi kebanyakan lebih bersifat penerusan dari periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena selama Orde Baru, politik luar negeri Indonesia lebih bersifat ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Indonesia di panggung internasional untuk meningkatkan postur ekonomi, di samping untuk menjaga keuntuhan NKRI. Namun kerusuhan Mei 1998 membuat citra Indonesia di mata dunia tercoreng. Penurunan citra tersebut membuat Indonesia kehilangan investor asing dan kehilangan kepercayaan dari pihak internasional.

Yang dibutuhkan Indonesia pada saat itu adalah peningkatan citranya kembali di mata internasional. Dengan demikian ekonomi akan membaik seiring dengan peningkatan citra dan meraih kepercayaan internasional kembali. Indonesia secara militer tidak memungkinkan untuk mengangkat citra, karena secara politis, militer Indonesia sedang mendapatkan perhatian di dunia internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru. Di sektor ekonomi, Indonesia juga tidak memiliki daya tarik selain pasar yang besar, namun daya beli rendah mengingat krisis Asia. Oleh karena itu *Soft Power* menjadi pilihan Pemerintahan SBY dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam pidato Presiden SBY “Meskipun *Soft Power* ini masih kontroversial di AS sendiri, ada pro dan kontra, tetapi kita aplikasikan dalam hubungan internasional sekarang ini, dalam diplomasi yang kita jalankan.”⁵⁷

Pilihan jatuh pada *Soft Power*, karena Indonesia memiliki asset yang mendukung untuk mengaplikasikan *Soft Power* dan *soft diplomacy* tersebut. Pertama Indonesia memiliki asset penduduk yang berjumlah 230 juta jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Namun berbeda dengan Islam di Timur Tengah yang cenderung homogenis dan agresif, Islam di Indonesia lebih majemuk dan toleran. Hal ini dapat menjadi asset diplomasi yang vital.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 157-160.

⁵⁷ Tabloid Diplomasi

Kedua, secara ekonomi, Indonesia masih memiliki banyak lahan yang perlu digarap. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini perbandingan Indonesia dengan dunia dalam hal ekonomi output.

Summary of World Output; Selected Regions and Countries
(annual percent change)

| Economies | Average 1991-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| WORLD | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 3 | -1.1 | 3.1 |
| <i>United States</i> | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 0.4 | -2.7 | 1.5 |
| Euro Area | <i>no data</i> | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | -4.2 | 0.3 |
| <i>Japan</i> | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2 | 2.3 | -0.7 | -5.4 | 1.7 |
| Developing Asia | 7.4 | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.8 | 10.7 | 7.6 | 6.2 | 7.3 |
| Middle East | 4 | 2.5 | 3.8 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 2 | 4.2 |
| Africa | 2.4 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 5.2 | 1.7 | 4 |
| <i>South Africa</i> | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | -2.2 | 1.7 |
| <i>Nigeria</i> | 1.9 | 8.2 | 21.2 | 10.3 | 10.6 | 5.4 | 6.2 | 7 | 6 | 2.9 | 5 |
| <i>Egypt</i> | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 4.7 | 4.5 |
| <i>Algeria</i> | 1.6 | 2.7 | 4.7 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 2.1 | 3.7 |
| <i>Libya</i> | 0.2 | -4.3 | -1.3 | 13 | 4.4 | 10.3 | 6.7 | 7.5 | 3.4 | 1.8 | 5.2 |
| <i>Morocco</i> | 2.4 | 7.6 | 3.3 | 6.3 | 4.8 | 3 | 7.8 | 2.7 | 5.6 | 5 | 3.2 |
| <i>Angola</i> | 1.3 | 3.1 | 14.5 | 3.3 | 11.2 | 20.6 | 18.6 | 20.3 | 13.2 | 0.2 | 9.3 |
| <i>Sudan</i> | 3.5 | 6.2 | 5.4 | 7.1 | 5.1 | 6.3 | 11.3 | 10.2 | 6.8 | 4 | 5.5 |
| <i>Tunisia</i> | 4.7 | 5 | 1.7 | 5.6 | 6 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 3 | 4 |
| <i>Kenya</i> | 1.7 | 4.7 | 0.3 | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 1.7 | 2.5 | 4 |
| INDONESIA | 4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 4 | 4.8 |

Sumber: *World Economic Outlook October 2009; International Monetary Fund (IMF)*

Tabel 2.2.

Melalui tabel di atas dapat dilihat pada era 1991-2000 saja, output Indonesia setingkat dengan Timur Tengah. Begitu pula paska reformasi, output ekonomi Indonesia berjalan meningkat setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan Indonesia masih memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa ekonomi outputnya justru cenderung menurun tiap tahunnya, karena sudah tidak ada lahan baru lagi untuk dikembangkan.

Ketiga, asset historis. Indonesia memiliki peran yang besar dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Bahkan tidak dapat dipungkiri apabila tanpa inisiatif Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika 1955, banyak negara-negara di Afrika dan Asia masih dijajah. Dapat dikatakan hubungan baik Indonesia dan negara – negara Afrika terjalin dengan baik setelah Konferensi Asia – Afrika 1955. Bahkan negara – negara di Afrika memandang bahwa tanpa adanya prakarsa dari Indonesia

yang dominan, Konferensi Asia – Afrika akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu secara historis hubungan Indonesian dengan benua Afrika kaya dengan nuansa ikatan emosional yang kuat. Berikut daftar negara Afrika yang meraih kemerdekaannya setelah KAA 1955.

Tabel Negara Afrika yang meraih kemerdekaannya setelah KAA 1955

| Tahun | Negara |
|-------------------------|--|
| Sebelum KAA berlangsung | Mesir, Ethiopia, Liberia, Libia, Afrika Selatan |
| 1956 | Maroko, Sudan, Tunisia |
| 1957 | Ghana |
| 1958 | Guinea |
| 1960 | Kamerun, Chad, Kongo Brazzavile, Kongo Kinshasa, Dahomey, Gabon, Pantai Gading, Madagaskar, Mali Mauritania, Niger, Nigeria, Somalia, Senegal, Togo, Upper Volta |
| 1961 | Sierra Leone |
| 1962 | Aljazair, Rwanda, Burundi, Uganda |
| 1963 | Kenya |
| 1964 | Tanzania, Malawi, Zambia |
| 1965 | Gambia |
| Setelah tahun 1965 | Angola, Botswana, Spanish Sahara, Guinea Bissau, Equatorial Guinea, Cabinda, Djibouti, Lesotho, Zimbabwe, Mozambik, Namibia |

Sumber: Asia Africa: Towards The First Century

Tabel 2.3.